

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penekanan terhadap kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan daerah merupakan salah satu kunci utama berdasarkan pada ciri khas masing-masing daerah (*endogenous development*). Potensi daerah dapat dimaksimalkan dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, serta sumber daya buatan yang dimiliki oleh daerah tersebut (Nurkholis & Khusaini, 2019). Dalam kebijakan tersebut, harus menekankan bagaimana pemerintah daerah menyusun kebijakan anggarannya agar digunakan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin.

Keuangan daerah yang dinyatakan dalam bentuk anggaran merupakan suatu rencana atau rancangan operasional daerah, yang mana menggambarkan penerimaan atau pendapatan daerah dan pengeluaran daerah untuk membiayai belanja rutin dan pembangunan daerah dalam jangka waktu satu tahun (Naswandi et al., 2019). Kebijakan anggaran tidak bisa dipisahkan dari sistem perencanaan. Dalam sebuah sistem, anggaran merupakan akhir dari proses perencanaan. Sebuah perencanaan akan dimulai dari perencanaan jangka panjang, jangka menengah, hingga perencanaan tahunan. Namun, proses perencanaan dapat menggunakan referensi dari tahun-tahun sebelumnya (Nurkholis & Khusaini, 2019).

Anggaran merupakan rencana tertulis suatu organisasi secara kuantitatif jangka waktu tertentu dalam satuan uang. Secara garis besar anggaran digunakan sebagai alat manajemen dalam mencapai suatu tujuan (I.Pangkey., 2015). Oleh karena itu, anggaran belanja harus dilakukan penyusunan yang baik dan benar agar sesuai dengan program atau aktivitas yang akan dijalankan. Perencanaan anggaran belanja yang baik dan benar akan memberikan penyerapan anggaran yang baik pula (Halim, 2014). Perencanaan anggaran belanja yang baik dilakukan dengan mengklasifikasikan program-program ke dalam rencana jangka pendek dan rencana jangka panjang. Adanya pengklasifikasian tersebut akan memfokuskan anggaran pada sesuatu yang lebih penting dan direalisasikan terlebih dahulu (Putra, 2020).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah juga menggambarkan hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang dinilai dalam bentuk uang termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam jangka waktu satu tahun (Sari et al., 2018). Anggaran memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perencanaan keuangan suatu daerah maupun pengendalian pada organisasi pemerintahan, karena sangat bergantung pada jumlah anggaran yang akan direalisasikan atau diberikan oleh pemerintah (Harry et al., 2019). Pengeluaran yang dilakukan oleh daerah menjadi pusat perhatian karena berkaitan dengan kinerja pemerintah dalam satu periode atau satu tahun anggaran. Setiap organisasi pemerintah diharuskan untuk meningkatkan kinerjanya agar dapat tercipta *good publik* dan *good governance* (Tamasoleng, 2015).

Pada Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwasannya penyelenggaraan pemerintah daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintah daerah harus ditingkatkan agar terbangun relasi dengan pemerintah pusat. Ditinjau dari Permendagri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menyatakan bahwa kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah sebagai pelaksana kewenangan daerah otonom.

Penyusunan APBD harus sesuai dengan penyelenggaraan urusan atau operasional pemerintahan, serta patuh pada ketentuan perundang-undangan, efektif, efisien, bertanggungjawab, dan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat seperti yang dijelaskan pada Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 31 Tahun 2016. Sebagai acuan pemerintah dalam mengukur pencapaian efektifitas dan efisiensi tentunya dibutuhkan APBD melalui penyelenggaraan otonomi daerah. Sehingga akuntabilitas dan *Good Governance* dapat berjalan sebagaimana mestinya (Harry et al., 2019).

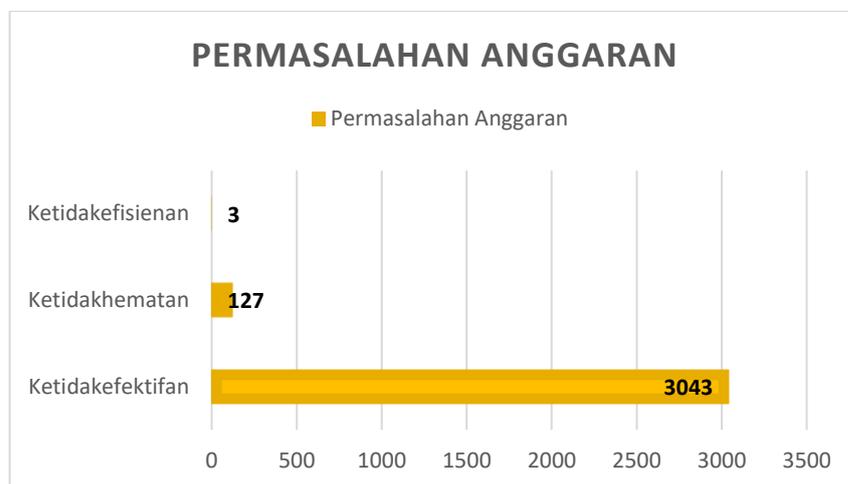
Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara efektif dan efisien dalam memenuhi *value for money*, akuntabilitas dan transparansi akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai sesuai dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemerintahan daerah juga harus menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang memenuhi prinsip ketepatan waktu dan standar akuntansi pemerintahan secara umum.

Oleh karena itu, anggaran belanja yang telah disusun oleh organisasi pemerintah harus diukur efektivitas dan efisiensinya, agar dapat dilakukan evaluasi pada kinerja organisasi pemerintah. Proses pengukuran efektivitas dan efisiensi ini berfungsi untuk mengukur seberapa besar anggaran belanja dapat diserap oleh organisasi pemerintah sesuai dengan program-program yang telah direncanakan. Menurut Dwiyanto dalam (Putra, 2020) Indikator pemerintahan yang baik adalah dapat tercapainya realisasi anggaran pemerintah.

Efektifitas dalam penggunaan anggaran berpengaruh terhadap kinerja pemerintah, dimana pemerintah dapat dinilai baik jika penggunaan anggaran dapat digunakan semaksimal mungkin sesuai dengan tujuan. Dalam hal ini, anggaran yang digunakan bukan serta-merta untuk dihabiskan melainkan harus dialokasikan secara bijak dan tepat sasaran. Sedangkan, efisiensi memiliki hubungan konsep produktivitas dalam melakukan perbandingan antara *output* yang dihasilkan dan *input* yang digunakan. Suatu anggaran dapat dikatakan efisien ketika hasil yang didapatkan dari anggaran belanja dapat melebihi target dari program atau kegiatan dari instansi tersebut (Mardiasmo, 2018).

Laporan Realisasi Anggaran menjadi alat untuk menganalisis rasio efektivitas dan efisiensi belanja dari lembaga atau organisasi pemerintah. Analisis ini tentunya berguna bagi instansi pemerintah, agar dapat mengetahui keseimbangan antar belanja untuk memprioritaskan belanja secara optimal yang menunjukkan produktifitas, efektivitas, dan efisiensi belanja daerah. Laporan keuangan yang disajikan merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk mengukur kinerja keuangan instansi pemerintah (Makaminang et al., 2022).

Penyusunan anggaran tentunya harus dilakukan analisis secara menyeluruh berdasarkan keefektifan dan keefisienan dalam penggunaan maupun pengalokasiannya, karena penggunaan anggaran atau penyusunan anggaran yang tidak tepat atau tidak sesuai akan berdampak pada keuangan negara. Dalam hal ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan permasalahan ketidakefektifan sebanyak 3.043, ketidakhematan 127, dan ketidakefisienan sebanyak 3 kasus (Hamdan, 2022).



*Gambar 1. 1 Permasalahan Anggaran
Sumber : bisnis.tempo.co (data diolah)*

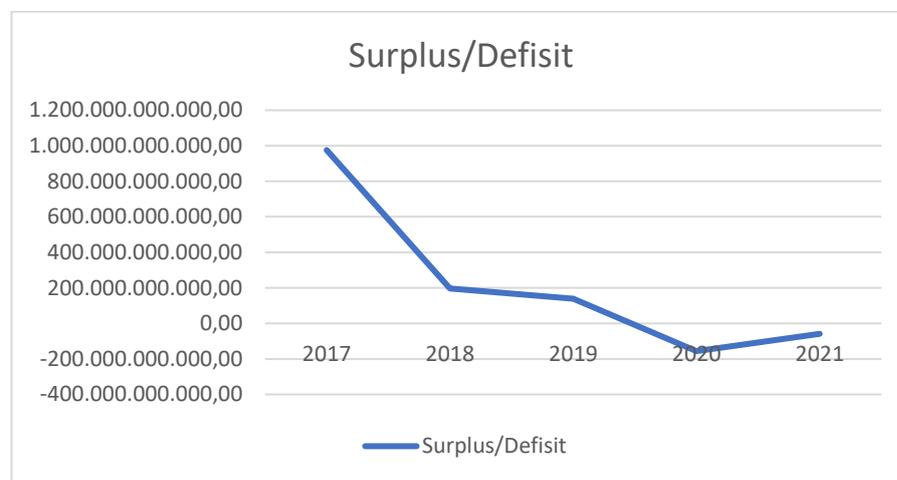
Dampak yang akan ditimbulkan terkait dengan adanya ketidakefektifan, ketidakhematan dan ketidakefisienan anggaran tentunya akan merugikan negara. ketidakefektifan penggunaan anggaran masih menjadi masalah yang besar di Indonesia, dimana pemerintah tidak dapat menggunakan anggarannya secara maksimal. Sedangkan, ketidakefisienan telah banyak berkurang, karena banyak lembaga atau organisasi pemerintah yang telah menggunakan anggaran belanja secara efisien sesuai dengan kebutuhannya.

Pengendalian keuangan pemerintah Kabupaten atau Kota sangat penting untuk dilaksanakan, agar anggaran belanja yang telah direncanakan dan ditetapkan dapat membiayai seluruh program dan aktivitas daerah. Dalam lingkup pemerintahan di Indonesia, penyajian laporan keuangan menjadi tanggungjawab secara tertulis atas kinerja keuangan yang telah dicapai oleh Pemerintah Daerah.

Pemerintah Kabupaten atau Kota juga harus mempertanggungjawabkan setiap program atau aktivitas keuangan yang telah dilaksanakan. Laporan pertanggungjawaban keuangan diuraikan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran yang berguna untuk menilai ketercapaian anggaran. Dalam hal ini, dapat dilakukan analisis apakah anggaran sudah direalisasikan dengan baik atau tidak, serta mengetahui bahwa anggaran telah digunakan sebagaimana mestinya. Penggunaan anggaran yang efektif dan efisien untuk menghindari pengeluaran-pengeluaran yang tidak tepat sasaran (Makaminang et al., 2022).

Pada Pemerintah Kabupaten Gresik, anggaran belanja banyak digunakan untuk belanja kegiatan operasional dan belanja modal, tentunya hal ini dapat dirasakan oleh masyarakat dalam bentuk fasilitas-fasilitas umum yang telah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten. Dalam hal ini, membutuhkan dana belanja yang cukup besar agar fasilitas masyarakat dapat terpenuhi. Selain itu, di Kabupaten Gresik sendiri belanja pegawai merupakan salah satu belanja yang membutuhkan dana besar yang disebabkan banyaknya pegawai honorer yang menjadi tanggungjawab dari Pemerintah Kabupaten.

Besarnya dana untuk belanja Pemerintah Kabupaten Gresik tentunya dapat mempengaruhi surplus/defisit dalam laporan realisasi anggaran. Pada tahun 2020 dan 2021 Pemerintah Gresik memiliki nominal belanja yang besar dan pendapatannya tidak dapat memenuhi belanja-belanja yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik. Maka dari itu, terdapat surplus/defisit dalam laporan realisasi anggaran.



*Gambar 1. 2 Surplus/Defisit LRA Kabupaten Gresik
Sumber : gresikkab.go.id (data diolah)*

Berdasarkan data diatas yang menyatakan bahwa surplus/defisit dari pendapatan dikurangi dengan belanja cenderung menurun tetapi dari tahun 2017 hingga 2019 masih mengalami surplus. Sedangkan, pada tahun 2020 dan 2021 mengalami defisit yang cukup signifikan tetapi defisit tersebut masih bisa tertutupi dengan adanya pembiayaan yang berasal dari sisa lebih anggaran dari periode sebelumnya. Adanya surplus/defisit antara pendapatan dan belanja ini tentunya menimbulkan pertanyaan bahwasannya realisasi anggaran belanja di Kabupaten Gresik apakah telah dilakukan secara efektif dan efisien.

Sesuai dengan latar belakang yang telah dijelaskan, pemerintah daerah telah diberikan tanggungjawab dan wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat. Maka dari itu, pemerintah daerah harus bertanggungjawab atas aktivitas keuangan yang telah dilaksanakan. Adanya kasus tersebut pada Pemerintah Kabupaten Gresik Pada Tahun 2020 dan 2021 membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Anggaran Belanja Pada Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2017 – 2021”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, adapun permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.) Berapakah Presentase Tingkat Efektifitas Realisasi Anggaran Belanja di Kabupaten Gresik Periode 2017 – 2021?
- 2.) Berapakah Presentase Tingkat Efisiensi Realisasi Anggaran Belanja Langsung di Kabupaten Gresik Periode 2017 – 2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka dapat ditarik tujuan pada penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

- 1.) Untuk menganalisis tingkat efektivitas Realisasi Anggaran Belanja pada Kabupaten Gresik Tahun 2017 – 2021
- 2.) Untuk menganalisis tingkat efisiensi Realisasi Anggaran Belanja langsung pada Kabupaten Gresik Tahun 2017 – 2021

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperoleh informasi dalam rangka penggunaan anggaran atau realisasi anggaran secara efektivitas dan efisiensi pada Instansi Pemerintah. Adapun beberapa manfaat dalam penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran atau pertimbangan yang diperlukan oleh Instansi Pemerintah sehubungan dengan Efektivitas dan Efisien Realisasi Anggaran.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan suatu anggaran dapat dialokasikan dengan baik dan tepat sasaran, agar penggunaan anggaran efektif dan efisien pada Instansi Pemerintahan.

1.4.2 Manfaat Akademis

- a. Hasil penelitian ini akan memberikan pengetahuan sejauh mana implementasi Efektifitas dan Efisiensi realisasi anggaran belanja digunakan pada Organisasi Pemerintah.
- b. Penelitian ini dapat memberikan sumber informasi dan perkembangan Ilmu Akuntansi kedepannya yang digunakan dalam melakukan penilaian efektif dan efisien pada realisasi anggaran belanja pemerintah.
- c. Penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya yang akan melakukan atau memperbarui penelitian untuk menganalisis realisasi anggaran belanja secara efektif dan efisien